# DAFTAR PUSTAKA


Aisi, R. R., & Furqon, I. K. (2024). *Efektivitas Pemungutan Pajak Penghasilan Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara : Analisis Data Sekunder 2021-2024*. 40–50.

Badan Pusat Statistik. (2025). *No Title*. Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah). https://doi.org/https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara.html

Budiman, I. F., & Gumawang, I. R. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *6*(1), 1–22. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.95

Burhanudin, D., Trisnalianti, C., & Artikel, I. (2025). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang. *J-COOP*, *1*(2).

Firdausi, N. E., & Faisol, I. A. (2023). Konsep Tax Planning Pajak Penghasilan Badan Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. In *Simposium Nasional Perpajakan* (Vol. 2, Number 1).

Herlinanur, N., Reski Apriyani, Putri Rahmawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 83–91. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta – Triwulan III 2025 (Ekonomi Tetap Resilien, Mendorong Pertumbuhan Lewat Belanja Berkualitas dan Penerimaan yang Kuat)*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1). http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. (2026).

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*.

Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(4), 51–60. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560

Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib

Pajak. In *Journal of Accounting, Auditing and Taxation* (Vol. 1, Number 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/